

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia karena memiliki cadangan batu bara yang cukup signifikan, mencapai 2,134 miliar ton dari jumlah total cadangan batu bara di Indonesia yang sebanyak 38,8 miliar ton (Nauli, 2024) Produksi batu bara di Jambi pada tahun 2024 yaitu terdapat 11 juta ton. Daerah dengan produksi batu bara terbesar di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Sarolangun, disusul Kabupaten Batanghari, Bungo, Tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat (Almunanda, 2025). Kabupaten Muaro Jambi meskipun tidak termasuk produsen utama, namun hampir semua batu bara dari Provinsi Jambi diangkut ke wilayah ini untuk kemudian dikapalkan. Hal ini karena wilayah kabupaten Muaro Jambi mengelilingi ibu kota Provinsi dan memiliki pelabuhan terbesar yaitu pelabuhan Talang Duku.

Aktivitas bongkar-muat batu bara di pelabuhan memerlukan lahan yang cukup luas, terutama untuk kebutuhan *stockpile*. *Stockpile* batu bara adalah area penyimpanan sementara untuk menumpuk batu bara. Fasilitas ini biasanya berada dekat dengan lokasi penambangan, dermaga atau pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar (Maryuningsih, 2015).

PT. Sinar Anugerah Sukses (SAS) telah membeli lahan di Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi sejak tahun 2010 hingga 2013 untuk rencana pembangunan *stockpile* batu bara. Perusahaan mengaku telah memperoleh beberapa dokumen dan izin lingkungan terkait dengan aktivitas pertambangan batu bara di wilayah Muaro Jambi dan sekitarnya (Muslim, 2023). Dokumen dan

perizinan yang dimaksud antara lain adalah Dokumen Analisis dan Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Pembangunan Jalan Khusus Angkutan batu bara dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Provinsi Jambi. Hal ini diperlukan karena pembangunan *stockpile* yang direncanakan akan dilengkapi dengan pembangunan jalan khusus untuk mobilitas truk angkutan batu bara.

Rencana pembangunan *stockpile* batu bara di Kelurahan Aur Kenali tersebut mendapat penolakan dari masyarakat sekitar. Masyarakat yang melakukan penolakan terdiri dari warga Desa Mendalo Darat dan Desa Mendalo Laut di Kabupaten Muaro Jambi dan warga Kelurahan Aur Kenali di Kota Jambi. Penolakan tersebut disampaikan masyarakat melalui demonstrasi dengan mengusung tulisan pada karton dengan tulisan “Menolak *stockpile* Batu Bara” dan berorasi (Sanjaya, 2023).

Lokasi pemukiman warga diketahui relatif dekat dengan lokasi rencana pembangunan *stockpile*. Jarak rumah warga terdekat dengan lokasi pembangunan hanya sekitar ± 280 meter, sedangkan perumahan terdekat berjarak sekitar ± 370 meter. Penolakan masyarakat didasarkan pada kekhawatiran bahwa pembangunan *stockpile* batu bara akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan terutama polusi udara di tempat tinggal mereka. Di samping itu, masyarakat menganggap aktivitas angkutan batu bara dapat menghambat mobilisasi warga saat beraktivitas karena banyak sekolah, perkantoran dan pasar di dekat kawasan *stockpile* tersebut. Meskipun sudah direncanakan akan dibangun jalan khusus, namun pada titik-titik

tertentu jalan khusus tersebut akan memotong jalan umum. Secara keseluruhan keberadaan *stockpile* akan dapat menurunkan nilai properti di sekitar lokasi karena kekhawatiran akan dampak lingkungan, kesehatan dan kemacetan.

Proses penumpukan dan pengangkutan batu bara dapat menghasilkan debu yang mengandung partikel berbahaya, mencemari udara dan lingkungan sekitar (Almunanda, 2023). Debu batu bara yang terhirup dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan seperti asma dan silikosis. Selain itu, air hujan yang meresap ke dalam tumpukan batu bara dapat menghasilkan limbah asam yang mencemari tanah dan air (Murati et al., 2024).

Menanggapi penolakan warga tersebut, Direktur PT SAS (Fauzan) menyatakan bahwa semua potensi dampak yang ditimbulkan dari aktivitas batu bara itu, sudah ada kajiannya dalam Amdal dan Fauzan juga meyakinkan bahwa keberadaan *stockpile* tersebut tidak akan menyebabkan kerusakan dan polusi (Diskominfo Jambi, 2024). Pihak perusahaan telah mengadakan beberapa kali pertemuan sosialisasi kepada masyarakat dan melibatkan pemerintah daerah sebagai mediator. Sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai manfaat proyek, termasuk potensi peningkatan ekonomi dan lapangan kerja.

Proyek pembangunan fasilitas perusahaan yang bersinggungan dengan pemukiman masyarakat, sering kali menimbulkan ketegangan. Meskipun dalam hal ini perusahaan telah memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan, hal itu tidak menjamin masyarakat akan menerimanya. Sebagian masyarakat tetap meminta agar proyek rencana pembangunan *stockpile* batu bara dihentikan. Mereka juga

menuntut agar izin Amdal proyek tersebut dievaluasi ulang secara menyeluruh (WALHI, 2024). Amdal sering kali dianggap hanya sebagai formalitas, terutama jika masyarakat merasa bahwa dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas tidak diperhitungkan dengan baik.

Semenjak PT SAS mulai melakukan pembukaan dan pembersihan lahan pada tahun 2023 sebagai langkah awal pembangunan *stockpile*, warga baru menyadari akan adanya rencana tersebut. Setelah melakukan rembuk, warga menyatakan sikap menolak dan melakukan aksi unjuk rasa. Mulai akhir tahun 2023 sampai september tahun 2025, terjadi dinamika antara aksi penolakan oleh beberapa kelompok warga dan upaya pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan yang didukung oleh pemerintah daerah. Kedua kegiatan yang berseberangan ini berlangsung beberapa kali dengan lokasi, bentuk kegiatan dan waktu yang berbeda. Hingga saat ini, beragam tanggapan masyarakat muncul terhadap keberadaan proyek tersebut. Ada yang mulai terbuka, ada yang menolak dengan lemah, dan ada yang tetap menolak dengan keras. Situasi ini menunjukkan kompleksitas sosial yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain motif penolakan, perbedaan risiko dampak berdasarkan jarak pemukiman, peran ketokohan, imbalan yang diperoleh, relasi dengan kekuasaan, dan efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah.

Penelitian tentang penolakan terhadap pembangunan bukanlah hal yang baru, berdasarkan penelusuran literatur ada 3 isu utama terkait tema ini, Pertama penolakan dikaitkan dengan aspek hukum (Hartono, 2015) seperti tanggung jawab pidana pelaku usaha atas dampak lingkungan dan kesehatan, serta pentingnya

penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) menjelaskan bahwa masyarakat menolak proyek reklamasi karena berdampak pada aspek sosial ekonomi, adat budaya, dan lingkungan hidup, serta memunculkan konflik yang membutuhkan solusi kebijakan yang tepat. Sementara itu, pasca kegiatan pertambangan pasir di Desa Sumberwuluh, meskipun perusahaan memberikan kompensasi dan fasilitas kepada masyarakat, namun tetap menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya konflik sosial, polusi debu, dan kebisingan di lingkungan sekitar (Wardhani et al., 2020).

Meski penolakan terhadap rencana pembangunan *stockpile* batu bara dipicu oleh berbagai kekhawatiran tersebut di atas, kajian yang secara mendalam menelusuri aspek subjektif berupa pandangan risiko, ketidakpercayaan terhadap pelaksana proyek, pengalaman sosial, serta nilai-nilai lokal masyarakat masih sangat terbatas, terutama melalui pendekatan kualitatif. Dalam konteks ini, mencermati proses terbentuknya kelompok-kelompok warga yang melakukan penolakan, tingkat intensitas penolakan yang muncul, serta hubungan antara dinamika sosial dengan faktor-faktor pemicu tersebut menjadi hal yang penting dan menarik untuk diteliti. Tidak tertutup kemungkinan pula bahwa penelitian ini akan menemukan faktor-faktor baru di luar perkiraan awal yang dapat memperkaya pemahaman mengenai fenomena penolakan masyarakat terhadap proyek industri di wilayah pemukiman. Sejauh ini belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menyoroiti persoalan tersebut, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah guna memperdalam pemahaman mengenai perbedaan intensitas

penolakan warga terhadap rencana pembangunan *stockpile* batu bara di Kota Jambi dan Muaro Jambi.

1.2. Rumusan Masalah

Pembangunan *stockpile* batu bara oleh PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) di perbatasan Kelurahan Aur Kenali dan Desa Mendalo Darat telah memicu ketegangan sosial. Secara normatif, pembangunan industri seharusnya berjalan selaras dengan kesejahteraan masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam regulasi tata ruang. Namun, kehadiran proyek ini justru memunculkan penolakan dari warga yang merasa ruang hidup dan hak atas lingkungan sehat mereka terancam, sehingga menciptakan benturan kepentingan antara otoritas perusahaan dan aspirasi masyarakat.

Kesenjangan yang mendasar dalam fenomena ini terletak pada bagaimana sebuah kebijakan pembangunan yang telah memiliki legalitas formal tetap mendapatkan penolakan keras dari objek pembangunannya sendiri. Meskipun pihak perusahaan mengklaim telah memenuhi prosedur perizinan dan dokumen lingkungan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa legitimasi sosial tidak serta-merta mengikuti legitimasi administratif. Hal ini mengindikasikan adanya krisis kepercayaan dan perbedaan pandangan risiko yang tajam terkait dampak lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan ekonomi warga di masa depan.

Fenomena penolakan ini menjadi semakin kompleks secara sosiologis karena perlawanan yang muncul tidak bersifat seragam. Terdapat dinamika internal di dalam struktur masyarakat yang menunjukkan adanya perbedaan dalam merespons kehadiran proyek tersebut. Sebagian kelompok warga menunjukkan

aksi kolektif yang sangat progresif dan terorganisir, sementara kelompok lainnya cenderung mengambil posisi yang lebih moderat dan pasif, meskipun mereka berada dalam satu wilayah geografis yang terdampak.

Perbedaan intensitas perlawanan ini memberikan gambaran bahwa masyarakat bukanlah entitas yang homogen dalam menghadapi konflik pembangunan. Faktor-faktor seperti kedekatan geografis dengan sumber konflik, penguasaan informasi, serta pengalaman kolektif masa lalu diyakini memiliki peran dalam membentuk perbedaan perlawanan warga. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai alasan di balik perbedaan intensitas ini, upaya resolusi konflik lingkungan yang efektif dan inklusif akan sulit untuk dicapai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menggali lebih dalam mengenai konstruksi sosial di balik perbedaan sikap masyarakat terdampak. Fokus utama akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu: **“Mengapa terjadi perbedaan intensitas penolakan warga terhadap pembangunan *stockpile* batu bara di perbatasan Kelurahan Aur Kenali dan Desa Mendalo Darat?”**.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1.3.1. Tujuan Umum

Mendesripsikan perbedaan intensitas penolakan antar kelompok warga terhadap pembangunan *stockpile* batu bara di Kelurahan Aur Kenali Kota Jambi dan Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Menganalisis bentuk-bentuk penolakan dari masing-masing kelompok warga pada pembangunan *stockpile* batu bara di Kelurahan Aur Kenali dan Desa Mendalo Darat
2. Mengklasifikasikan perbedaan intensitas penolakan dari masing-masing kelompok warga pada pembangunan *stockpile* batu bara di Kelurahan Aur Kenali dan Desa Mendalo Darat
3. Mendeskripsikan penyebab perbedaan intensitas penolakan dari masing-masing kelompok warga pada pembangunan *stockpile* batu bara di Kelurahan Aur Kenali dan Desa Mendalo Darat

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan literatur bagi perkembangan ilmu sosiologi, khususnya dalam konteks konflik lingkungan yang melibatkan warga, perusahaan, dan pemerintah.
- b. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berhubungan dengan kajian sosiologi di bidang Pembangunan

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam memahami Penolakan pembangunan *stockpile* batu bara di Muaro Jambi.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain khususnya yang tertarik dengan masalah ini lebih lanjut

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konflik-konflik dalam Pembangunan

Istilah kata konflik dalam kehidupan sehari-hari sering dipahami secara terbatas sebagai percekocan dan perselisihan seperti perkelahian ataupun bahkan peperangan. Afrizal (2018) menyatakan bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata konflik dinyatakan memiliki makna yang banyak meliputi; percekocan, perselisihan, dan pertentangan.

Max Weber dalam Afrizal (2018) mengartikan kata konflik sebagai suatu bentuk hubungan sosial yang di dalamnya perbuatan sengaja dilakukan diarahkan keberatan kepada pihak lain, baik dengan menggunakan cara-cara yang damai maupun cara-cara kekerasan. Weber berpandangan, konflik dan kekerasan itu berbeda, kekerasan instrument dari pihak-pihak yang berebut. Konflik adalah keinginan atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak dalam suatu relasi sosial bertentangan satu sama lain. Pemenuhan kepentingan satu pihak mengakibatkan tidak terpenuhinya kepentingan pihak lain. Konflik merupakan fenomena sosial yang terjadi akibat perbedaan kepentingan antara individu, kelompok, atau pemerintah. Konflik adalah pertentangan kepentingan yang dipersepsikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Konflik dapat berskala kecil, seperti konflik antar individu, hingga konflik yang lebih luas antar kelompok atau negara (Afrizal, 2018)

Konflik merupakan sesuatu yang lumrah bisa terjadi dimana saja, di ranah apapun dalam konteks skala paling kecil seperti individu, keluarga, organisasi, negara dan lainnya. Skala tersebut bisa terjadi di berbagai ranah seperti ranah sosial, politik, ekonomi, agama terdapat di dalam pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Menurut Siagian (1994) pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan menurut Alexander (1994), pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya.

Pembangunan adalah upaya memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada. Pembangunan juga berarti seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan.

Konflik dalam pembangunan terjadi ketika ada perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan antar pihak. Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, keamanan dan kelangsungan hidup masyarakat di berbagai aspek, seperti sosial, budaya, politik, dan ekonomi (Jamaludin, 2016).

Ketegangan antara pembangunan dan kepentingan masyarakat lokal sering memicu konflik, terutama terkait lingkungan, budaya, dan pembebasan lahan. Ketimpangan distribusi sumber daya, khususnya tanah, menjadi penyebab utama

konflik agraria, terutama bagi petani dan masyarakat adat yang bergantung pada alam.

Dampak lingkungan dari proyek besar seperti infrastruktur dapat merusak ekosistem dan mengancam mata pencaharian, seperti yang terjadi pada pembangunan Jalan Tol Trans-Sulawesi. (Dwiatmaja et al., 2024) Konflik juga muncul akibat pembangunan yang mengabaikan identitas budaya, seperti di Papua. Proses pembebasan lahan seringkali memicu bentrokan, sebagaimana terlihat dalam kasus penolakan tambang di Desa Wadas (Rumkabu, 2022)

Penyelesaian konflik memerlukan pendekatan inklusif yang mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Contohnya, mediasi berbasis lembaga lokal dalam pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. (Ramelan et al., 2024). Selanjutnya dinyatakan bahwa kebijakan pembangunan sering lebih menguntungkan korporasi dan elit ekonomi, memicu perlawanan masyarakat. Konflik ini juga melibatkan aktor global yang berkepentingan dalam eksploitasi sumber daya.

1.5.2. Konsep Intensitas Penolakan

Penelitian ini berfokus pada fenomena penolakan warga yang tidak seragam, melainkan menunjukkan tingkatan atau intensitas yang berbeda. Untuk menganalisis perbedaan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori konflik sosial yang dikembangkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Meskipun Pruitt dan Rubin tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah "intensitas penolakan", konsep ini dapat dibangun secara teoritis melalui pemahaman mereka tentang eskalasi konflik (*conflict escalation*) dan taktik konflik (*conflict tactics*).

Menurut Pruitt dan Rubin (2011), konflik dimulai dari adanya persepsi bahwa kepentingan satu pihak terhalang oleh pihak lain. Ketika persepsi ini muncul, pihak-pihak yang berkonflik akan memilih strategi untuk merespons. Intensitas konflik, dalam pandangan mereka, tercermin dari perubahan atau transformasi yang terjadi seiring berjalannya waktu. Mereka mengidentifikasi lima transformasi kunci dalam proses eskalasi konflik yang dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur intensitas penolakan:

1. Ringan→Berat: Perubahan Taktik, Taktik yang bersifat ringan menuju yang bersifat berat. Perubahan taktik ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari serangkaian interaksi antara pihak yang berkonflik. Taktik ringan seperti persuasif, diskusi, negosiasi, atau penyampaian pendapat secara formal akan bergeser menjadi taktik berat seperti ancaman, demonstrasi, pemblokiran, atau tindakan yang bertujuan memaksakan kehendak.
2. Kecil → Besar: Perluasan isu, Konflik yang awalnya hanya mempermasalahkan isu spesifik (misalnya, debu atau kebisingan) meluas menjadi isu-isu yang lebih besar seperti ketidakadilan, pelanggaran hak, atau tata ruang wilayah.
3. Spesifik → Umum: Keluhan terhadap suatu proyek tertentu berubah menjadi kecurigaan atau permusuhan terhadap pihak-pihak yang dianggap mewakili kekuasaan, seperti pemerintah atau korporasi secara umum.
4. Berhasil → Menang → Menyakiti Pihak Lain: Pergeseran Tujuan, Pada tahap awal dari banyak konflik, semua pihak berusaha sebaik mungkin untuk kepentingannya sendiri, Tanpa memedulikan baik-buruknya hasil

yang diperoleh orang lain. Tujuan awal yang sederhana (misal, agar proyek direlokasi) berubah menjadi keinginan untuk memenangkan konflik, dan pada tahap ekstrem, bertujuan untuk menyakiti atau menghancurkan pihak lawan.

5. Sedikit → banyak: Peningkatan Jumlah Pihak, Konflik yang awalnya hanya melibatkan segelintir orang akan menarik lebih banyak partisipan, termasuk aktor-aktor baru seperti LSM, partai politik, atau aparat keamanan.

Kelima transformasi ini tidak selalu terjadi secara bersamaan atau berurutan, namun secara kolektif dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana suatu kelompok telah mengalami eskalasi dalam penolakan mereka

Meskipun Pruitt dan Rubin (2011) tidak secara eksplisit menggunakan istilah intensitas penolakan, konsep ini dapat dibangun secara deduktif dari kerangka eskalasi konflik yang mereka kembangkan. Intensitas penolakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tingkat kekuatan dan perkembangan konflik yang ditunjukkan oleh suatu kelompok warga, yang tercermin dari perubahan taktik, perluasan isu, serta konsistensi keterlibatan mereka dari waktu ke waktu.

Semakin tinggi intensitas penolakan, semakin berat taktik yang digunakan (dari sekadar diskusi menjadi aksi massa), semakin luas isu yang diperjuangkan (dari masalah lingkungan lokal menjadi tuntutan kebijakan publik), dan semakin besar jumlah pihak yang terlibat.

1.5.3. Bentuk-Bentuk Penolakan dalam Pembangunan

Penolakan terhadap proyek pembangunan, terutama yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial seperti *stockpile* batubara, merupakan

fenomena sosial-politik yang kompleks. Konflik yang timbul seringkali tidak hanya melibatkan dua pihak atau dua sisi yang berlawanan, melainkan berkembang dalam rentang waktu dan strategi perlawanan yang beragam, menyesuaikan dengan kekuasaan, risiko yang dihadapi, dan struktur sosial masyarakat. Untuk mendalami bentuk-bentuk perlawanan ini penting untuk menganalisis dinamika di Kelurahan Aur Kenali (perkotaan) dan Desa Mendalo Darat (pinggiran/perdesaan). Didalam teori James C. Scott (2001), ia memberikan kerangka analitis yang dimana Scott membedakan secara konseptual perlawanan masyarakat menjadi dua bentuk besar, yaitu:

1. 1. Perlawanan Terbuka (Open Resistance)

Menurut Scott, perlawanan terbuka merupakan penolakan yang dilakukan secara terang-terangan dan kolektif, penolakan ini sering kali dalam bentuk aksi protes yang dapat mengganggu jalannya struktur sosial. Bentuk ini biasanya muncul ketika saluran aspirasi formal dianggap tidak efektif. Scott mencatat bahwa perlawanan terbuka sering kali ditandai dengan tindakan-tindakan seperti demonstrasi massa, pemblokiran jalan, mogok kerja, atau bahkan huru-hara. Meski kata "kekerasan" digunakan, Scott lebih menekankan pada sifatnya yang confrontational dan berisiko tinggi bagi pelakunya.

Ciri-ciri utama perlawanan terbuka menurut Scott adalah:

a. Terorganisir, sistematis, dan kooperatif: Aksi dilakukan dengan perencanaan, pembagian peran, dan melibatkan koordinasi antarwarga atau bahkan dengan dukungan dari organisasi masyarakat sipil (misalnya, LSM lingkungan atau lembaga bantuan hukum). Dalam kasus *stockpile*, hal ini bisa terwujud dalam

pembentukan tim perjuangan warga, atau kerja sama dengan akademisi untuk membuat kajian independen.

b. Berprinsip atau tanpa pamrih: Motif perlawanan didasarkan pada nilai-nilai kolektif yang lebih besar, seperti keadilan lingkungan, hak atas kesehatan, atau kedaulatan wilayah kelola masyarakat. Tujuannya bersifat public good, bukan keuntungan pribadi.

c. Mempunyai akibat-akibat yang berpotensi memberontak: Meski tidak selalu menggulingkan kekuasaan, aksi ini berpotensi mengubah kebijakan (policy change), membatalkan proyek, atau setidaknya memaksa negosiasi ulang yang signifikan. Dampaknya terlihat jelas dan langsung terhadap struktur kekuasaan atau rencana investasi.

d. Mengandung gagasan yang menentang dasar dominasi: Perlawanan ini sering disertai dengan narasi tandingan yang jelas, seperti penolakan terhadap logika pembangunan ekonomi yang mengorbankan ekologi, atau kritik terhadap prosedur perizinan yang tidak partisipatif.

Dalam kasus pembangunan *stockpile* batubara, perlawanan terbuka dapat terwujud dalam bentuk demonstrasi di kantor pemerintah atau perusahaan, Pembentukan aliansi dengan media untuk ekspose dampak negatif, Pengajuan gugatan hukum (legal standing) ke pengadilan, Aksi duduk di lokasi proyek (occupation), atau Pemblokiran akses truk pengangkut batubara.

2. Perlawanan Terselubung (Hidden/Everyday Resistance)

Scott menjelaskan bahwa dalam banyak situasi, terutama di mana ketimpangan kekuasaan sangat besar dan risiko represi (dari negara atau perusahaan) tinggi,

masyarakat lebih memilih bentuk perlawanan yang tersamar, individual, dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Perlawanan ini disebut "senjata kaum lemah" (weapons of the weak). Bentuknya jarang berupa aksi massa, tetapi lebih pada praktek-praktek bawah tanah yang melemahkan legitimasi atau operasi proyek tanpa konfrontasi langsung. Scott mencatat tanda-tandanya seperti penyebaran gossip, isu, atau kabar burung (rumors) yang cepat menyebar untuk membentuk pandangan kolektif yang negatif terhadap proyek atau aktor pendukungnya, serta tindakan-tindakan sembunyi-sembunyi.

Ciri-ciri utama perlawanan terselubung adalah:

- a. Tidak terorganisir, tidak sistematis, dan individual: Meski bisa dilakukan banyak orang, tindakan ini tidak memerlukan koordinasi formal. Setiap individu atau kelompok kecil melakukan aksinya sendiri-sendiri berdasarkan ketidakpuasan yang sama. Contohnya, satu per satu warga menolak menjual tanah tanpa perlu ada komando terpusat.
- b. Bersifat pamrih (Instrumental): Tindakan ini sering kali dimotivasi oleh kepentingan langsung pelakunya untuk bertahan hidup, mengurangi beban, atau mencari keuntungan kecil, meski dalam kerangka penolakan yang lebih luas. Misalnya, sengaja "lalai" memberikan informasi atau menghambat survei lapangan.
- c. Tidak mempunyai akibat revolusioner secara langsung: Secara individual, tindakan ini tampak kecil dan tidak signifikan. Namun, ketika dilakukan secara masif dan terus-menerus, dapat mengakumulasi efek yang signifikan, seperti penundaan proyek, peningkatan biaya operasi, atau pengikisan legitimasi sosial.

d. Bersifat praksis, bukan ideologis: Lebih fokus pada tindakan langsung untuk mengganggu atau menghambat, daripada menyuarakan narasi perlawanan yang utuh di ruang publik.

Dalam penelitian ini, perlawanan terselubung dapat mencakup: penyebaran informasi tentang dampak buruk batubara melalui percakapan sehari-hari atau media sosial terbatas, Pembuatan petisi diam-diam, penolakan halus untuk berpartisipasi dalam sosialisasi yang diadakan perusahaan (boikot halus), Perusakan kecil-kecilan terhadap alat survei atau tanda batas lahan, Sengaja "tidak paham" atau memberikan data yang tidak lengkap dalam proses konsultasi, hingga menyembunyikan informasi tentang batas-batas tanah ulayat atau sumber mata air.

1.5.4. Tinjauan Sosiologis

Dalam penelitian ini, fenomena penolakan warga terhadap rencana pembangunan *stockpile* batu bara dianalisis melalui lensa teori konflik yang dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf. Asumsi dasar dari Dahrendorf adalah konflik sebagai hasil dari ketidaksetaraan kekuasaan dalam struktur sosial. Struktur masyarakat yang terdiri dari kelompok yang memiliki otoritas dan kelompok yang tunduk pada otoritas menyebabkan konflik sosial yang terjadi karena distribusi kekuasaan yang tidak merata, di mana kelompok yang memiliki otoritas akan mempertahankan status quo demi kepentingannya, sedangkan kelompok yang tidak memiliki otoritas cenderung melakukan perlawanan. Konflik muncul karena ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh proyek tersebut, sementara ada juga yang mungkin tidak terlalu terpengaruh atau bahkan mendukungnya (Johnson, 1986)

Masyarakat yang menolak pembangunan *stockpile* dapat dikategorikan dalam kasus ini, kelompok konflik (*conflict group*), yang secara aktif berusaha menentang kebijakan yang dianggap merugikan mereka. Namun, tidak semua kelompok masyarakat menolak dengan tingkat intensitas yang sama, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor struktural dan tingkat kesadaran sosial mereka.

Dahrendorf dalam Ritzer (2004) membagi kelompok sosial dalam konflik menjadi tiga, yakni :

1. Kelompok semu (*quasi group*) merupakan sekumpulan individu yang memiliki posisi sosial serupa tetapi belum memiliki kesadaran kolektif terhadap kepentingan bersama. Masyarakat yang tidak aktif dalam penolakan bisa saja masih berada dalam tahap ini karena kurangnya informasi atau keterlibatan langsung dalam dampak pembangunan *stockpile*.
2. Kelompok kepentingan (*interest group*) merupakan masyarakat yang telah memiliki kesadaran bersama tentang dampak proyek tersebut dan mulai terorganisir dalam menentang pembangunan.
3. Kelompok konflik (*conflict group*) kelompok yang benar-benar aktif melakukan aksi penolakan, seperti demonstrasi, petisi, atau tekanan terhadap pemerintah dan investor untuk memperjuangkan perubahan dalam struktur sosial atau distribusi kekuasaan.

Dahrendorf menyebut prasyarat ini sebagai "Conditions of Organization" (Kondisi-kondisi Organisasi). Agar kelompok semu yang hanya memiliki "kepentingan laten" (tersembunyi) bisa berubah menjadi kelompok yang memiliki

"kepentingan manifes" (nyata), ada tiga kategori persyaratan utama, yaitu : persyaratan teknis (Technical Conditions), persyaratan politik (Political Conditions) dan persyaratan sosial

Persyaratan teknis (Technical Conditions) adalah faktor internal yang dibutuhkan agar sebuah kumpulan individu bisa terorganisir. Persyaratan teknis antara lain adalah adanya Kehadiran Tokoh, adanya ideologi atau piagam, serta adanya staf dan fasilitas. Harus ada idividu atau kelompok kecil yang mengambil peran sebagai pemimpin atau inisiator. Tanpa pemimpin, kegelisahan massa hanya akan menjadi keluhan tanpa arah. Kelompok juga membutuhkan seperangkat ide, nilai, atau tuntutan yang jelas. Selain itu adanya orang-orang yang mengurus administrasi, logistik, atau strategi komunikasi agar gerakan tetap berjalan.

Persyaratan politik (Political Conditions) berkaitan dengan lingkungan makro di mana kelompok tersebut berada. Persyaratan ini ditandai dengan adanya keterbukaan sistem politik dan kebebasan berserikat. Melalui keterbukaan sistem politik kelompok semu bisa berubah menjadi kelompok konflik yang aktif, sistem politik harus memberikan ruang. Jika sebuah negara bersifat totaliter dan melarang perkumpulan, maka kelompok semu akan sangat sulit bertransformasi karena adanya penindasan. Melalui kebebasan berserikat akan ada jaminan hukum untuk melakukan demonstrasi, mengeluarkan pendapat, dan berkumpul secara sah. Tanpa ini, kelompok kepentingan mungkin ada, tapi mereka akan bergerak di bawah tanah dan sulit menjadi kelompok konflik yang efektif secara publik.

Persyaratan sosial (Social Conditions) berkaitan dengan interaksi antar anggota di dalam kelompok. Interaksi ini dicirikan dengan adanya Komunikasi

yang Intens dimana anggota kelompok semu harus bisa saling berkomunikasi dengan mudah. Teknologi (seperti WhatsApp group) atau pertemuan rutin di balai desa sangat mempercepat perubahan ini. Selain itu ,Kedekatan Geografis atau Struktural akan lebih mudah bagi orang-orang yang tinggal berdekatan atau memiliki profesi yang sama untuk membentuk kelompok. Dalam kasus *stockpile*, warga yang terdampak langsung di sekitar lokasi memiliki peluang lebih besar untuk bertransformasi karena mereka merasakan keresahan yang sama setiap hari.

Faktor lain yang berperan dalam perbedaan intensitas penolakan adalah posisi masing-masing kelompok dalam struktur sosial dan politik lokal. Masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan otoritas atau mendapat manfaat dari proyek mungkin lebih pasif atau bahkan mendukung pembangunan. Sebaliknya, komunitas yang merasa dirugikan tanpa kompensasi yang memadai akan lebih bersemangat untuk menentang. Konflik ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan dalam masyarakat tidak homogen, melainkan distribusi otoritas dan akses ke sumber daya dipengaruhi (Ritzer, 2004) faktor kesadaran akan dampak proyek juga mempengaruhi. Jika warga di suatu wilayah sudah pernah mengalami dampak negatif dari proyek serupa, mereka lebih cenderung menolak dengan keras dibandingkan dengan warga yang belum merasakan dampaknya secara langsung (Johnson, 1986)

Dahrendorf juga menekankan bahwa perbedaan pendapat bukan satu-satunya alasan konflik. Dia juga mengatakan bahwa ketidaksamaan dalam bagaimana seseorang dapat memperoleh kekuasaan dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, daerah yang memiliki akses lebih besar ke media, jaringan politik,

atau dukungan dari organisasi eksternal mungkin lebih berani menyuarakan penolakan mereka daripada daerah yang tidak memiliki sumber daya ini. Oleh karena itu, perbedaan tingkat penolakan terhadap *stockpile* batu bara di Kelurahan Aur Kenali dan Desa Mendalo Darat tidak sekadar perselisihan pendapat itu lebih tentang bagaimana setiap kelompok masyarakat menghadapi kebijakan ini berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik mereka sendiri (Johnson, 1986).

1.5.5. Penelitian Relevan

Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan dukungan dari penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi dan landasan bagi peneliti dalam menjalankan penelitian kedepannya. Penelitian yang relevan adalah studi yang telah dilaksanakan dan memiliki hubungan atau kaitan yang signifikan dengan topik atau isu yang sedang diteliti. Berikut adalah beberapa penelitian relevan untuk mendukung penelitian ini:

Tabel 1. 1
Penelitian Relevan

No.	Penelitian/ Judul Penelitian/ Tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan/ Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	(Roito et al., 2022) Gerakan Sosial Masyarakat Pluit Putri Jakarta Utara (Studi Kasus: Penolakan Rencana Pembangunan Sekolah Bina	Mengetahui latar belakang warga Pluit Putri menolak pembangunan BTB School, dinamika gerakan sosial masyarakat dalam memperjuangkan kepentingannya, serta pengaruh gerakan sosial terhadap	Masyarakat menolak pembangunan sekolah di perumahan mereka karena tidak dilibatkan dalam perencanaan serta khawatir terhadap kemacetan dan kebisingan. Warga Pluit	Penelitian ini lebih mengarah ke masyarakat yang tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan serta khawatir oleh dampak negatif yang ditimbulkan

	Tunas Bangsa)	rencana pembangunan sekolah	Putri melakukan audiensi, demonstrasi, gugatan ke PTUN, dan kampanye di media untuk menolak proyek ini. Upaya mereka berhasil memperlambat pembangunan yang direncanakan sejak 2019 dan hingga kini belum selesai.	Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang perbedaan intensitas penolakan warga terhadap rencana pembangunan <i>stockpile</i> Batu Bara di Mendalo Darat, Mendalo Laut dan Aur Kenali Jambi.
2.	(Sulistiani et al., 2024) Gerakan Sosial dalam Penolakan Pertambangan di Sungai Sadding	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi-strategi yang digunakan oleh Gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat setempat	Hasil penelitian Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo melakukan beberapa langkah strategis, termasuk mengumpulkan massa dan anggota, menjalin relasi dengan pihak-pihak terkait, serta melaksanakan aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan.	Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis strategi-strategi yang digunakan oleh Gerakan Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat setempat Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang perbedaan intensitas penolakan warga terhadap rencana pembangunan <i>stockpile</i> Batu Bara di Mendalo Darat, Mendalo Laut dan Aur Kenali Jambi.
3	(Herman et al., 2024)	Tujuan penelitian ini adalah untuk	Hasil penelitian menunjukkan	Penelitian ini bertujuan untuk

	<p>Perlindungan hukum terhadap Masyarakat atas kegiatan <i>stockpile</i> batu bara di kabupaten Muaro Jambi</p>	<p>mengetahui pengaturan hukum atas kegiatan <i>stockpile</i> batu bara di Kabupaten Muaro Jambi dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terhadap masyarakat yang terkena dampak kegiatan <i>stockpile</i> batu bara di Kabupaten Muaro Jambi.</p>	<p>adanya kekosongan hukum dalam pengaturan <i>stockpile</i> batu bara dan tidak tegasnya Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melakukan upaya penegakan hukum terhadap <i>stockpile</i> batu bara yang telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan</p>	<p>mengkaji pengaturan hukum terkait kegiatan <i>stockpile</i> batu bara di Kabupaten Muaro Jambi serta untuk mengevaluasi upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terhadap masyarakat yang terdampak oleh kegiatan tersebut</p> <p>Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang perbedaan intensitas penolakan warga terhadap rencana pembangunan <i>stockpile</i> batu bara di Mendalo Darat, Mendalo Laut dan Aur Kenali Jambi.</p>
--	---	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Metode penelitian adalah cara dan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan data menjawab pertanyaan penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (baik lisan maupun tulisan)

serta perbuatan manusia. Peneliti tidak berupaya menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang diperoleh, sehingga tidak melakukan analisis angka (Afrizal, 2014)

Pada penelitian kualitatif ini, tipe yang digunakan yaitu tipe deskriptif. Tujuannya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dengan kondisi yang sebenarnya tanpa melebih-lebihkan sehingga data dikumpulkan dalam bentuk kata kata tulisan maupun lisan yang didapatkan dari informan. Maka dari itu, penelitian ini berfokus dalam mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang terjadi pada penolakan warga terhadap rencana pembangunan *stockpile* batu bara di Muaro Jambi khususnya Masyarakat yang berada di Kelurahan Aur Kenali dan Mendalo Darat.

1.6.2. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang topik yang diteliti dan bersedia untuk berbagi informasi tersebut. Informan dalam penelitian kualitatif bukan hanya responden mereka juga berfungsi sebagai narasumber yang menawarkan perspektif dan pengetahuan baru tentang fenomena sosial yang diteliti. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa informan penelitian merupakan orang yang memiliki informasi tentang data yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik

pemilihan sampel yang dilakukan dengan sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam *purposive sampling*, subjek penelitian dipilih karena dianggap memiliki informasi yang penting, relevan, dan mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian (Afrizal, 2014). Dengan mengetahui teknik *purposive sampling*, maka peneliti berpedoman berdasarkan kriteria di atas dalam pencarian informan. Hal ini bertujuan supaya penelitian terfokus pada masalah agar data yang didapat tidak bias.

Menurut (Afrizal, 2014) terdapat dua kategori informan, yaitu ;

1. Informan Pelaku adalah orang yang memberikan informasi tentang dirinya sendiri, tindakan, pikiran, interpretasi atau pengetahuannya. Mereka merupakan subjek penelitian atau sumber data utama itu sendiri yang memberikan keterangan kepada peneliti.

Agar tujuan penelitian ini tercapai, diperlukan beberapa kriteria informan yang terlibat dalam proses pengumpulan data, yaitu:

- a. Aktor-aktor yang terlibat aktif dalam penolakan terkait kasus rencana terhadap pembangunan *stockpile* Batu bara di Aur Kenali dan Mendalo Darat
- b. Pemimpin-pemimpin formal yang terlibat dalam penolakan (Ketua RT) terkait kasus rencana terhadap pembangunan *stockpile* Batu bara di Aur Kenali dan Mendalo Darat.

Berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan diatas, maka didapatkan informan pelaku pada penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Informan Pelaku

No.	Nama	Umur	Alasan Pemilihan Informan
1.	Fauzi	54 Tahun	Ketua RT 20 Mendalo Darat
2.	Mahfuddin	55 Tahun	Ketua RT 03 Aur Kenali
3.	Syaiful	67 Tahun	Ketua RT 05 Aur Kenali
4.	SR (Inisial)	55 Tahun	Ketua RT 06 Aur Kenali
5.	Yusniati	50 Tahun	Ketua RT 15 Aur Kenali
6.	Sarianto	55 Tahun	Ketua RT 04 Aur Kenali
7.	Sailin	64 Tahun	Ketua RT 21 Mendalo Darat
8.	Kris	50 Tahun	Ketua forum Aur Kenali serta Ketua RT 17 Aur Kenali
9.	Jauhari	59 Tahun	Ketua RT 02 Aur Kenali
10.	Toni	63 Tahun	Mengikuti demonstrasi
11.	Zulkarnain	48 Tahun	Mengikuti demonstrasi
12.	Dlomeri	59 Tahun	Koordinator lapangan RT 20 Mendalo Darat.
13.	Kinanti	25 Tahun	Ikut menandatangani petisi penolakan
14.	Ega	34 Tahun	Mengikuti demonstrasi

Sumber: Data Primer Penelitian, 2025

Pemilihan informan dalam penelitian ini merupakan aktor-aktor yang terlibat aktif seperti ketua forum warga dan koordinator lapangan. Informan dalam kategori ini dipilih karena keterlibatan aktif mereka dalam mengorganisasi demonstrasi, membangun jaringan komunikasi lintas RT, serta merumuskan strategi penolakan secara kolektif. Kehadiran mereka penting untuk memahami

dinamika internal gerakan, pola mobilisasi massa, serta proses pembentukan solidaritas warga.

Sebagian besar informan merupakan ketua RT di wilayah terdampak, baik di Kelurahan Aur Kenali maupun Mendalo Darat. Mereka dipilih karena memiliki posisi formal di tingkat komunitas, berfungsi sebagai penghubung antara warga dan pihak eksternal, serta memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai aspirasi, kekhawatiran, dan bentuk-bentuk penolakan yang berkembang di lingkungan masing-masing. Sebagai tokoh lokal, para ketua RT juga berperan dalam proses sosialisasi informasi, koordinasi warga, serta pengambilan sikap kolektif terhadap rencana pembangunan tersebut.

Peneliti juga memilih beberapa informan warga yang ikut serta dalam aksi demonstrasi dan penandatanganan petisi penolakan, meskipun tidak memiliki jabatan struktural. Informan ini dipilih untuk merepresentasikan suara warga akar rumput, sehingga penelitian tidak hanya menggambarkan perspektif elite lokal, tetapi juga pengalaman langsung warga yang terlibat dalam aksi penolakan.

Dengan komposisi informan yang beragam mulai dari ketua RT, tokoh forum, koordinator lapangan, hingga warga peserta aksi penelitian ini diharapkan mampu memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai bentuk, intensitas, serta penyebab penolakan warga terhadap rencana pembangunan *stockpile* batu bara PT SAS.

2. Informan Pengamat adalah orang yang memberikan informasi tentang orang lain, atau suatu peristiwa (kejadian) atau hal tertentu kepada peneliti. Dengan kata

lain, informan pengamat adalah orang yang menjadi saksi suatu kejadian atau pengamat dari kejadian tersebut.

Informan pengamat pada penelitian ini, yaitu :

- a. Pihak perusahaan PT SAS
- b. Staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi
- c. Walhi
- d. Kepala Desa dan Pak Lurah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Data informan tersebut dapat diperjelas pada tabel berikut :

Tabel 1. 3
Informan Pengamat

NO	Nama	Umur	Status/Jabatan
1.	Lindawati	56 Tahun	Kepala Bidang Tata Lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup)
2.	Ginda	34 Tahun	Manajer Advokasi, Kajian, dan Kampanye (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)
3.	Ibnu	42 Tahun	Head eksternal Relationship/Humas (PT Sinar Anugerah Sukses)
4.	Totong Wahyudi	45 Tahun	Lurah Aur Kenali
5.	Agoes	40 Tahun	Sekretaris Desa Mendalo Darat

Sumber: Data Primer Penelitian, 2025

1.6.3. Data yang Diambil

Data yang dikumpulkan pada penelitian kualitatif umumnya berupa kata-kata (baik lisan maupun tulisan) perilaku atau perbuatan manusia, dan tidak diubah menjadi data angka (Afrizal, 2014) Berdasarkan sumbernya, data dikategorikan menjadi dua (Sugiyono, 2010) yaitu : Data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan atau didapatkan langsung oleh peneliti dari subjek

penelitian atau informan di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua, baik dari individu maupun catatan secara tidak langsung dari sumber datanya.

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Aktor-aktor dan pemimpin formal (Ketua RT) yang terlibat aktif dalam aksi demonstrasi penolakan terkait terhadap rencana pembangunan *stockpile* Batu Bara di Mendalo Darat, Jambi, Pihak perusahaan PT SAS Jambi, Pihak Dinas Lingkungan Hidup Jambi (DLH) yaitu Kepala bidang tata ruang, Pihak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jambi (WALHI) yaitu Manajer Advokasi, Kajian, dan Kampanye, Kepala Kelurahan Aur Kenali, Kepala Desa Mendalo Darat. Data sekunder dari penelitian ini adalah dokumen Amdal, Artikel berita, Buku, Jurnal dan dokumen lain yang terkait dengan izin perusahaan bersangkutan, serta data statistik (demografi desa) dan arsip kedinasan yang terkait. Tabel 1.4 berikut menjelaskan data yang diambil yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 4
Data yang Diambil

No.	Tujuan	Data yang dikumpulkan	Teknik Pengumpulan Data
1.	Menganalisis bentuk-bentuk penolakan dari masing-masing kelompok warga pada rencana pembangunan <i>stockpile</i> batu bara di Kelurahan Aur Kenali dan Desa Mendalo Darat	- Tindakan-tindakan penolakan dari masing-masing kelompok warga pada rencana pembangunan <i>stockpile</i> batu bara di Kelurahan Aur Kenali dan Desa Mendalo Darat	- Wawancara Mendalam - Dokumentasi
2.	Memetakan perbedaan	- Membandingkan masing-masing	- Wawancara Mendalam

	intensitas penolakan dari masing-masing kelompok warga pada rencana pembangunan <i>stockpile</i> batu bara di Kelurahan Aur Kenali dan Desa Mendalo Darat	tindakan penolakan warga/RT kedalam 3 kategori : 1.Penolakan Kuat 2.Penolakan Sedang 3.Penolakan Rendah	
3.	Mendeskripsikan penyebab perbedaan intensitas penolakan dari masing-masing kelompok warga pada rencana pembangunan <i>stockpile</i> batu bara di Kelurahan Aur Kenali dan Desa Mendalo Darat	- Penyebab penolakan dari masing-masing kelompok warga pada rencana pembangunan <i>stockpile</i> batu bara di Kelurahan Aur Kenali dan Desa Mendalo Darat	- Wawancara Mendalam

1.6.4. Proses Penelitian

Dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, Peneliti melaksanakan serangkaian tahapan proses penelitian. Setelah melaksanakan seminar proposal, peneliti kemudian bertemu dengan dosen pembimbing untuk membahas lebih lanjut mengenai saran dan masukan yang diberikan oleh dosen penguji. Setelah melakukan perbaikan, peneliti menyusun pedoman wawancara. Setelah itu peneliti mulai melakukan pengumpulan data di lapangan. Setelah itu, peneliti melanjutkan dengan pengumpulan data di lapangan.

Proses pengumpulan data dimulai dengan pengurusan surat izin penelitian ke Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan tujuan surat kepada

Kepala Lurah Aur Kenali, Kepala Desa Mendalo Darat, Kepala bidang tata lingkungan DLH Provinsi Jambi dan Manajer Advokasi, Kajian, dan Kampanye WALHI Jambi. Pengurusan surat izin penelitian dilakukan pada tanggal 26 Mei 2025. Pada tanggal 27 Mei 2025, peneliti mendatangi Kantor Lurah Aur Kenali dan Kantor Desa Mendalo Darat dengan membawa surat izin penelitian. Kedatangan peneliti bertujuan untuk meminta izin penelitian di nagari tersebut sekaligus untuk wawancara sebagai informan pengamat dalam penelitian ini serta meminta data sekunder terkait Kelurahan Aur Kenali dan Desa Mendalo Darat.

Pada tanggal 28 Mei 2025, Peneliti menemui ketua RT 20 Mendalo Darat atas nama Muhammad Fauzi karena peneliti melihat bahwa lokasi RT 20 Mendalo Darat ini sangat dekat dengan rencana pembangunan *stockpile* batu bara. Jarak lokasi *stockpile* ke rumah terdekat RT 20 yaitu $\pm 284,62$ m. Setelah itu, Peneliti mendapatkan arahan dari pak Fauzi untuk bertemu koordinator lapangan wilayah Mendalo Darat yaitu bapak Dlomeri. Karena rumah pak Dlomeri dekat dengan pak Fauzi, Peneliti di hari itu juga mengunjungi rumah beliau. Sesampainya disana, ternyata pak Dlomeri sedang berada di rumah, Peneliti pun langsung menyampaikan niatnya untuk mewawancarai beliau menjadi informan pelaku pada penelitian.

Pada tanggal 30 Mei 2025, Peneliti mencari informan yang rumahnya dekat dengan rencana proyek tersebut. Peneliti akhirnya mendapatkan informan untuk di wawancara menjadi informan pelaku bernama Kinanti dan pada tanggal 31 Mei 2025, Peneliti kembali ke Desa Mendalo Darat untuk mewawancarai informan

pelaku berinisial SA yang sudah di kontak terlebih dahulu karena mendapatkan nomornya dari pak Fauzi.

Pada tanggal 1 Juni 2025, Peneliti menemui informan pelaku Bernama Pak Ega dan Zulkarnain karena mereka juga mengikuti aksi penolakan demonstrasi dan Pak Ega menceritakan dengan detail apa yang dia ketahui dari awal mulanya terjadi penolakan. Pak Ega merupakan ketua pemuda yang berada di perumahan Akbar. Jarak perumahan Akbar ke lokasi sekitar 200m. Karena peneliti sudah merasa cukup untuk mengambil data di Desa Mendalo Darat, untuk besoknya peneliti mengambil data ke Kelurahan Aur Kenali yaitu pada tanggal 2 Juni 2025. Dari pagi peneliti sudah keliling mencari rumah RT atau warga yang bersedia untuk di wawancara.

Setelah Peneliti mencoba ke rumah RT 03 karena secara dilihat dekat dengan lokasi rencana pembangunan *stockpile* batu bara tersebut. Ternyata pak RT nya tidak ada tetapi peneliti meminta nomor *WhatsApp* beliau dengan tujuan untuk mengatur ulang pertemuan wawancara di rumahnya. Pada hari ini juga jam 20.00 Wib pak RT menyuruh saya datang ke rumahnya untuk wawancara sebagai informan pelaku.

Pada tanggal 4 Juni 2025, Peneliti menemui empat orang ketua RT yaitu RT 05, RT 06, RT 04 dan RT 02 yang rumahnya dekat disekitar rencana pembangunan *stockpile* batu bara. Informan tersebut bernama Syaiful, berinisial SR, Sarianto, dan Jauhari. Peneliti menanyakan ketersediaan informan untuk wawancara dan mereka bersedia menjadi informan pelaku dalam penelitian ini.

Setelah itu peneliti melanjutkan wawancara kepada informan pelaku pada tanggal 14 Juni 2025 dengan ibu Yusniati sebagai ketua RT 15. Peneliti mengetahui ibu Yusniati dari warga pas saat peneliti setelah sholat di masjid. Warga tersebut memberitahu bahwa ketua RT mereka terlibat mengikuti aksi penolakan untuk mengayomi dan memberikan bantuan berupa makanan dan minuman saat aksi tersebut.

Peneliti mewawancarai informan pengamat dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tanggal 16 Juni 2025 dengan ibu Lindawati yang menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan untuk memastikan apakah informasi yang didapatkan sejalan dengan informan pelaku, terutama yang berkaitan dengan prosedur perizinan, cara pengawasan lingkungan, serta peran pemerintah dalam menanggapi penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan *stockpile* batu bara oleh PT SAS. Dari wawancara tersebut, Peneliti mendapatkan nomor *WhatsApp* Pihak PT SAS dari bagian humas yaitu bapak Ibnu.

Setelah mendapatkan nomor *WhatsApp* tersebut, Peneliti langsung menghubungi dengan tujuan menyampaikan niat peneliti untuk mewawancarai beliau menjadi informan pengamat pada penelitian. Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Juni 2025 di coffe shop dengan bapak Ibnu yang menjabat sebagai *Head eksternal Relationship* (Humas) dari Pihak PT SAS, Peneliti mendapatkan informasi tentang cara perusahaan melihat konflik, seperti bagaimana perusahaan menanggapi penolakan, bagaimana perusahaan bersosialisasi, dan bagaimana perusahaan mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Perusahaan berusaha menjalankan prosedur sesuai ketentuan perizinan, secara

bertahap melakukan sosialisasi, dan memberikan kesempatan untuk berbicara dengan masyarakat, kata bapak Ibnu. Selain itu, dia menekankan betapa pentingnya pemerintah daerah berperan sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Pada tanggal 20 Juni 2025, peneliti melakukan wawancara dengan pihak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi. Proses wawancara ini sebelumnya telah direncanakan sejak dua minggu sebelumnya, sambil menunggu penentuan jadwal yang sesuai dari pihak WALHI. Dalam wawancara tersebut, peneliti memperoleh berbagai informasi penting terkait pandangan dan analisis WALHI terhadap rencana pembangunan *stockpile* batu bara oleh PT SAS di Kelurahan Aur Kenali, serta tanggapan mereka terhadap dinamika penolakan warga yang terjadi di sekitar lokasi proyek.

Wawancara terakhir dilakukan pada tanggal 26 Juni 2025, Peneliti sebelumnya sudah membuat janji di *WhatsApp*. Setelah itu, peneliti mengunjungi rumah bapak Kris yang merupakan Ketua Forum Aur Kenali dan Ketua RT 17. Dari wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi bahwa penolakan warga terhadap rencana pembangunan *stockpile* batu bara PT SAS muncul sejak tahap awal sosialisasi yang dilakukan sekitar satu tahun lalu. Warga mengetahui proyek tersebut dari pihak kelurahan dan langsung menunjukkan sikap waspada karena memahami potensi dampak lingkungan seperti debu, kebisingan, dan pencemaran. Penolakan muncul bukan karena provokasi.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan dalam proses penelitian untuk mengumpulkan informasi, data atau bahan mentah yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Teknik ini sangat penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2010). Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendalami informasi dari seorang informan. Wawancara dilakukan seperti dua orang yang sedang bercakap-cakap tentang sesuatu (Afrizal, 2014). Wawancara mendalam dapat diartikan sebagai proses penggalian informasi yang dilakukan secara mendalam, terbuka, serta terperinci yang bertujuan untuk mencapai tujuan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan nuansa dari subjek yang diteliti melalui pertanyaan terbuka untuk mendorong informan berbagi cerita mereka secara lebih bebas.

Wawancara mendalam dilakukan melalui beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan, antara lain: Pertama, peneliti mencari informasi yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan melalui informasi dari aktor dan pemimpin formal (ketua RT) yang terlibat aktif dalam penolakan terkait rencana pembangunan *stockpile* batu bara di Kelurahan Aur Kenali dan Desa Mendalo Darat. Kedua, Peneliti terlebih dahulu menanyakan kesediaan informan dan menyepakati waktu

pelaksanaan wawancara. Terakhir, Peneliti melaksanakan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Apabila setelah wawancara terdapat informasi yang perlu digali lebih dalam, peneliti kemudian menjadwalkan kembali waktu wawancara lanjutan bersama informan.

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai aktor-aktor, Pemimpin formal (RT) yang terlibat aktif dalam penolakan terkait kasus rencana terhadap pembangunan *stockpile* batu bara di Aur Kenali dan Mendalo Darat. Wawancara mendalam dilakukan di beberapa lokasi yaitu rumah informan, Kantor Kelurahan Aur Kenali, Kantor Desa Mendalo Darat, Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kantor Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan coffe shop. Selama pelaksanaan, penulis memanfaatkan buku catatan untuk mencatat poin-poin krusial, ponsel sebagai perangkat perekam suara, serta pedoman wawancara yang telah dirancang berdasarkan masukan dosen pembimbing. Hal ini bertujuan agar proses wawancara lebih terstruktur, sistematis, dan selaras dengan sasaran penelitian.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merujuk pada pengumpulan dan analisis berbagai jenis dokumen relevan dengan topik penelitian. Dokumen ini dapat berupa teks, gambar, video atau bentuk lain yang dapat memberikan informasi tambahan atau konteks yang mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Studi dokumen ini sebagai pelengkap yang dapat memperkuat bukti dan menambah kepercayaan terhadap suatu fenomena. Dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini seperti Monografi desa, Dokumentasi aksi penolakan berupa foto dan

spanduk, Surat penolakan, Rencana pembangunan sesuai pemerintah daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

1.6.6. Unit Analisis

Unit analisis adalah objek yang menjadi fokus dalam penelitian. Unit analisis penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau fenomena sosial yang ingin diteliti dan dianalisis. Unit analisis sangat penting dalam proyek penelitian karena menentukan apa yang akan diukur dan dianalisis. Peneliti harus jelas tentang "siapa" atau "apa" yang menjadi subjek penelitian mereka. Fokus dari penelitian ini berada pada tingkat kelompok sosial khususnya kelompok warga yang terlibat aktif dalam penolakan terhadap rencana pembangunan *stockpile* batu bara di Muaro Jambi

1.6.7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan langkah yang terstruktur untuk menyusun, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian, dimulai dari pengumpulan data hingga tahap penulisan laporan (Afrizal, 2014)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi analisis data penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap (Afrizal, 2014), yaitu :

1. Tahap Kodifikasi Data

Pada penelitian ini, peneliti menuliskan catatan-catatan penting dalam penelitian. Untuk hasil wawancara yang diperoleh dari informan di Kelurahan Aurkenali dan Mendalo Darat. Peneliti merekam secara langsung wawancara tersebut. Kemudian, rekaman wawancara tersebut peneliti pindahkan ke dalam bentuk transkrip wawancara. Setelah itu, peneliti kembali membaca data dengan memberi tanda pada bagian-bagian yang dinilai penting serta sesuai dengan fokus penelitian yaitu mengapa terjadinya perbedaan intensitas kelompok warga pada rencana pembangunan *stockpile* batu bara di Jambi

Selanjutnya, Peneliti melakukan pengkodean data secara manual terhadap pernyataan-pernyataan informan dengan menggunakan simbol, warna, atau singkatan tertentu guna membedakan tema-tema utama, seperti aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai contoh pernyataan yang berkaitan dengan "pemasangan spaduk" penulis beri kode (PS), sedangkan pernyataan tentang "pengiriman surat penolakan" penulis tandai dengan (SP).

2. Tahap Penyajian Data

Dalam tahapan analisis yang lebih lanjut, peneliti dapat mengelompokkan hasil penelitiannya dan menampilkan hasil tersebut. Penyajian data dilakukan dengan cara membuat matriks yang berisi kolom-kolom yang diberi judul menurut istilah yang telah dibuat, hal ini akan mempermudah peneliti dalam proses analisis, dengan kondisi data yang tersusun rapih, data kualitatif yang pada umumnya bersifat naratif dengan

jumlah yang banyak menjadi lebih mudah dan efektif untuk dibaca. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan matriks untuk mengelompokkan informasi mengenai perbedaan intensitas kelompok warga serta penyebab perbedaan kelompok warga terhadap rencana pembangunan *stockpile* batu bara.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data, di mana peneliti menyusun kesimpulan atau melakukan verifikasi berdasarkan temuan yang diperoleh dari data. Peneliti akan menginterpretasikan hasil wawancara atau dokumen yang relevan. Setelah kesimpulan diperoleh, peneliti kemudian memverifikasi keakuratan interpretasi tersebut dengan meninjau kembali proses pengkodean dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan.

1.6.8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan dilakukan yang dapat diartikan sebagai setting atau konteks penelitian. Lokasi ini tidak terbatas pada wilayah, tetapi juga bisa mengacu pada organisasi atau sejenisnya (Moleong, 2002). Adapun penelitian ini berlokasi terutama di Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi dan Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

1.6.9. Definisi Operasional Konsep

1. Penolakan: Tindak tutur yang digunakan untuk menyampaikan ketidaksetujuan, baik secara langsung maupun tidak terhadap rencana pembangunan
2. Warga : orang yang menjadi bagian dari suatu kelompok sosial atau wilayah tertentu, dan aktif dalam sistem sosial yang ada di dalamnya.
3. Rencana pembangunan: Rencana pembangunan adalah suatu proses penyusunan sistematis, terarah, dan berkelanjutan dari langkah-langkah atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu dalam pembangunan sektor atau objek tertentu.
4. *Stockpile* batu bara : area penyimpanan sementara untuk menumpuk batu bara yang dibawa dari pit penambangan menggunakan alat angkut (Trailer) dan kemudian akan dimuat ke dalam tongkang
5. Perbedaan intensitas: tingkat keterlibatan dan kesungguhan berbagai kelompok masyarakat dalam menolak pembangunan *stockpile* batu bara, yang ditunjukkan melalui perbedaan dalam bentuk, frekuensi, dan kekuatan ekspresi penolakan.

1.6.10. Jadwal Penelitian

Penelitian ini berjalan selama 11 bulan, dimulai dari bulan Maret sampai bulan Februari 2026. Adapun jadwal penelitian sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 1. 5
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Tahun 2025									Tahun 2026		
		Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okto	Nov	Des	Jan	Feb	
1.	Seminar Proposal	■											
2.	Menyusun Instrumen Penelitian		■	■	■	■	■	■					
3.	Pengumpulan Data			■	■	■	■	■					
4.	Analisis Data					■	■	■	■				
5.	Penulisan Laporan dan Bimbingan Skripsi					■	■	■	■	■	■	■	
6.	Ujian Skripsi												■

